



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2022

INDEPENDENSI-INTEGRITAS-PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) BPK.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dituangkan dalam Renstra Perwakilan DKI Jakarta Tahun 2020-2024, mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Renstra BPK dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Pencapaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta diukur dengan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Laporan ini berisi pencapaian dan evaluasi atas Sasaran Strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Laporan kinerja merupakan salah satu parameter untuk meningkatkan kinerja dan memperoleh masukan perbaikan atau umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja tersebut.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33.154.591.000,00 dengan realisasi capaian skor kinerja atas 13 (tiga belas) target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah 99.14. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan upaya peningkatan capaian kinerja sebagai salah satu upaya mendukung visi, misi dan tujuan BPK serta mendorong percepatan reformasi birokrasi yang menghasilkan tata kelola negara yang transparan, akuntabel dan berwibawa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 31 Januari 2023
Kepala Perwakilan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayub Amali'.

Ayub Amali

NIP 196903211996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya	6
E. Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.....	10
1. Visi.....	10
2. Misi.....	10
3. Nilai Dasar.....	10
4. Sasaran Strategis.....	11
B. Target Kinerja.....	14
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Hasil Evaluasi AKIP.....	17
B. Capaian Kinerja	20
1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.....	25
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.....	26
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	27
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	29
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.....	31
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.....	31
7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	33
8. Hasil Evaluasi AKIP.....	34
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.....	36

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	38
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.....	40
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.....	41
13. Tingkat Kinerja Anggaran.....	42
C. Analisis Efisiensi.....	44
D. Perubahan Budaya Kerja.....	46
E. Realisasi Anggaran.....	47
F. Inovasi.....	50
G. Penghargaan.....	50
BAB IV PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pembagian Penugasan Subauditorat pada Entitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	4
Tabel 2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	6
Tabel 3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	6
Tabel 4	Anggaran Kegiatan Pemeriksaan.....	7
Tabel 5	Anggaran Kegiatan Setjen dan Pendukung.....	8
Tabel 6	APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2016-2022.....	8
Tabel 7	Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	14
Tabel 8	Aktivitas Utama Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 9	Hasil Evaluasi Utama atas Implementasi SAKIP Tahun 2021.....	17
Tabel 10	Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022...	21
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir.....	23
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024.....	24
Tabel 13	Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020-2024.....	25
Tabel 14	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 15	Perkembangan Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 16	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 17	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024.....	31
Tabel 18	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 19	Perkembangan Capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020-2024.....	33

Tabel 20	Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 21	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 22	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020-2024.....	38
Tabel 23	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020-2024.....	40
Tabel 24	Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 25	Hasil Penilaian Biro Keuangan atas EKA, EPA dan Tingkat Kinerja Anggaran.....	43
Tabel 26	Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran	43
Tabel 27	Upaya Efisiensi per Indikator Kinerja Utama.....	44
Tabel 28	Pagu dan Realisasi Anggaran RKP TA 2022.....	47
Tabel 29	Pagu dan Realisasi RKSP TA 2022.....	48
Tabel 30	Indikator Kinerja Keluaran beserta Anggaran dan Realisasi Tahun 2022.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.....	5
Gambar 2	Sasaran Strategis.....	11
Gambar 3	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.....	12
Gambar 4	Alur Pikir Pengembangan Renstra.....	13
Gambar 5	Skor Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022.....	21
Gambar 6	Grafik Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi.....	29
Gambar 7	Grafik Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	38
Gambar 8	Pola Pikir dan Budaya Kerja “ <i>Smart and Green</i> ”.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, namun juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 520 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 522 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan;

2. Subauditorat DKI Jakarta I;
3. Subauditorat DKI Jakarta II;
4. Subauditorat DKI Jakarta III;
5. Subauditorat DKI Jakarta IV; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing tugas pada Sekretariat Perwakilan, Subauditorat, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- d. Subbagian Keuangan;
- e. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
- f. Subbagian Hukum.

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Sekretariat Perwakilan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

2. Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Subauditorat DKI Jakarta I, Subauditorat DKI Jakarta II, Subauditorat DKI Jakarta III dan Subauditorat DKI Jakarta IV yang mempunyai tugas:

- a. pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan tugas Subauditorat pada entitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibagi berdasarkan fungsi entitas, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan Nomor 2/K/XVIII.JKT/1/2022 tentang Entitas Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1
Pembagian Penugasan Subauditorat pada Entitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Subauditorat	Pembagian Entitas	Nama Entitas
Subauditorat DKI Jakarta I	entitas yang memiliki fungsi pemerintahan dan unit pelaksana teknis daerah terkait	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Kota Administrasi Jakut; Kota Adm. Jakpus; Kota Adm. Jaktim; Kota Adm. Jakbar; Kota Adm. Jaksel; Kab. Adm. Kep. Seribu; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Badan Pengelolaan Aset Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamomg Praja.
Subauditorat DKI Jakarta II	entitas yang memiliki fungsi pengelolaan pajak daerah, unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas, serta BUMD	Badan Pendapatan Daerah; Badan Pembinaan BUMD; PT. Bank DKI; PD Pasar Jaya; PT. Pembangunan Jaya Ancol; PT. Penjaminan Kredit Daerah Jakarta; PD Dharma Jaya; PT Food Station Tjipinang Jaya; PT MRT Jakarta; PT Jakarta Tourisindo; PT Jakarta Propertindo; PT

Subauditorat	Pembagian Entitas	Nama Entitas
		Transportasi Jakarta; PD Pembangunan Sarana Jaya; PD PAM Jaya; PD PAL Jaya; PT JIEP.
Subauditorat DKI Jakarta III	entitas yang memiliki fungsi pendidikan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sumber daya dan perdagangan, kesehatan, serta unit pelaksana teknis daerah terkait	Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas SDA; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Kebudayaan; Badan Pengembangan SDM; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; BLUD yang berada di bawah Dinas Teknis terkait.
Subauditorat DKI Jakarta IV	entitas yang memiliki fungsi tata ruang dan lingkungan hidup, perumahan dan pekerjaan umum, perhubungan dan sosial, serta unit pelaksana teknis daerah terkait	Dinas Bina Marga; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Dinas Sosial; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; BLUD yang berada di bawah Dinas Teknis terkait.

Berikut Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Lampiran XXII Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2022.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022 sebanyak 203 orang yang terbagi menjadi:

a. Berdasarkan Golongan

Sumber daya manusia pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Golongan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	TTT	Total
1.	Kepala Perwakilan	1					1
2.	Kepala Sekretariat Perwakilan	1					1
3.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta I	1					1
4.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta II	1					1
5.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta III	1					1
6.	Kepala Subauditorat DKI Jakarta IV	1					1
7.	Subauditorat DKI Jakarta I	7	21				28
8.	Subauditorat DKI Jakarta II	6	21				27
9.	Subauditorat DKI Jakarta III	4	22				26
10.	Subauditorat DKI Jakarta IV	5	21				26
11.	Subbagian Tata Usaha Kalan		4	1		3	8
12.	Subbagian SDM	3	7			2	12
13.	Subbagian Keuangan	1	9	1			11
14.	Subbagian Humas	1	4	1		2	8
15.	Subbagian Hukum	4	1				5
16.	Subbagian Umum dan TI	4	9	1		32	46

b. Berdasarkan Kelompok Jabatan

Sumber daya manusia pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kelompok Jabatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kelompok Jabatan

No	Unit Kerja	Kelompok Jabatan						TTT	Total
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional Pemeriksa	Jabatan Fungsional Lainnya		
1.	BPK Perwakilan	1							1
2.	Sekretariat Perwakilan		1						1
3.	Subauditorat DKI Jakarta I		1			28			29

4.	Subauditorat DKI Jakarta II		1			27			28
5.	Subauditorat DKI Jakarta III		1			26			27
6.	Subauditorat DKI Jakarta IV		1			26			27
7.	Subbagian TU Kalan			1	4			3	8
8.	Subbagian SDM			1	5		4	2	12
9.	Subbagian Keuangan			1	6		4		11
10.	Subbagian Humas			1	3		2	2	8
11.	Subbagian Hukum			1	4				5
12.	Subbagian Umum TI			1	10		3	32	46

2. Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memperoleh pagu Anggaran sebesar Rp33.154.591.000,00, yang terdiri dari:

- Anggaran Kegiatan Pemeriksaan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp7.542.345.000,00, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4
Anggaran Kegiatan Pemeriksaan

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	6.478.416.000	11 LHP
2	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	18.223.000	10 LHP
3	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.200.000	1 Laporan
4	Sumbangan IHPS Perwakilan	7.829.000	2 Laporan
5	Laporan Profil Entitas Perwakilan	16.010.000	1 Laporan
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	175.591.000	2 Laporan
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	90.086.000	2 Laporan
8	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	754.990.000	6 LHP
	JUMLAH	7.542.345.000	

- b. Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp25.612.246.000,00, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5
Anggaran Kegiatan Setjen dan Pendukung

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran
1	Layanan Perkantoran	23.141.422.000	1 Layanan
2	Layanan Sarana Internal	405.500.000	17 Unit
3	Layanan Prasarana Internal	410.000.000	3 Unit
4.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	128.200.000	14 Unit
5	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	242.243.000	12 Laporan
6	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.284.881.000	20 Laporan
	JUMLAH	25.612.246.000	

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dalam Renstra BPK Perwakilan DKI Jakarta 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024, dan hasil analisa perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta saat ini dengan kondisi yang diharapkan.

Isu-isu strategis yang diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perlu Ditingkatkan

Tingkat tindak lanjut menunjukkan efektivitas rekomendasi sebagai langkah perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Tingkat tindak lanjut yang rendah dapat diartikan juga bahwa rekomendasi perbaikan sulit dan/atau tidak dapat diterapkan oleh entitas.

2. Kompleksitas atas Entitas Pemeriksaan

Kota Jakarta memegang peranan sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan, sekaligus pusat pendidikan dan kebudayaan. Aktivitas tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbesar di Indonesia.

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 6
APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2016-2022

Entitas	APBD/APBD-P (dalam Triliun Rupiah)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pemprov DKI Jakarta	67,16	70,19	83,26	86,89	63,23	79,89	82,80

Jumlah APBD yang besar tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan besar dan mendasar di Jakarta, seperti kemacetan, pemenuhan air bersih, penanganan banjir, pengurangan dan pengendalian pencemaran udara, kemiskinan, pendidikan yang belum merata.

Untuk mendorong akuntabilitas, transparansi dan kebermanfaatan hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk memperhatikan isu-isu besar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jakarta melalui perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi hasil pemeriksaan.

3. Peningkatan Kompetensi SDM BPK

Kesesuaian jumlah pemeriksa merupakan hal yang penting untuk dapat menjamin pemeriksaan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan peran, kompetensi, dan jabatan yang telah ditetapkan. Peningkatan kompetensi pemeriksa harus sering dilakukan melalui *workshop*, pendidikan dan pelatihan, serta *Focus Group Discussion* (FGD) dan aktivitas *Knowledge Menegement* lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, nilai dasar, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Visi

Visi BPK 2020–2024 adalah menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

2. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, akan mendukung misi BPK 2020-2024.

3. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK yang terdiri dari:

a. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, serta tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Sasaran Strategis

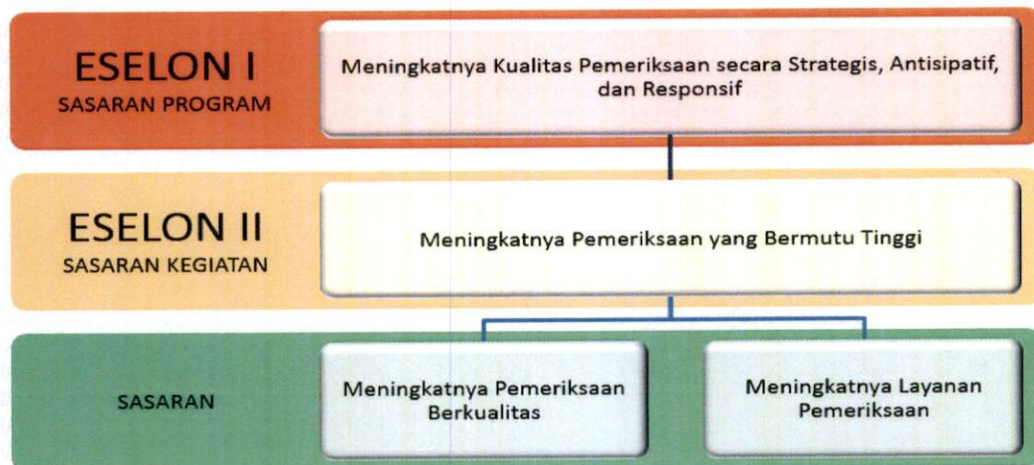
Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi dua sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas; dan
- 2) Meningkatkan layanan pemeriksaan.

Sasaran Strategis tersebut selaras dengan Sasaran Strategis BPK yaitu “meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sasaran strategis tersebut juga mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan AKN V yaitu “meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”, sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendukung salah satu strategi BPK yaitu “Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”. Untuk mendukung strategi tersebut, BPK Perwakilan DKI Jakarta menetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Satker sebagaimana dalam visualisasi sebagai berikut.



Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas “dasar hukum”, “lingkungan strategis”, “kondisi saat ini”, dan “kondisi yang diinginkan”.

Bagian “dasar hukum” memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang best practices suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI).

Bagian “lingkungan strategis” memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional.

Sedangkan, bagian “kondisi saat ini” memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*.

Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar sebagai berikut.



Gambar 4 Alur Pikir Pengembangan Renstra

Kondisi yang diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara, dilakukan antara lain dengan:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, mensinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*.
2. Rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART), serta dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa dan capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat.
3. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK.
4. Meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian Negara.
5. Tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang dilengkapi dengan kurikulum, metode, dan media pembelajaran yang komprehensif sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi, serta didukung fasilitator yang kompeten dan manajemen yang professional.

7. Terwujudnya SDM BPK sebagai human capital yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK.
8. Terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra BPK 2020–2024, maka target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra BPK 2020–2024 tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani pada Januari 2022.

Sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target pencapaian IKU dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran Strategis dan Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp32.002.495.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
- Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp6.913.112.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
- Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp25.089.383.000	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)

	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Sesuai Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022, aktivitas utama yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana dalam tabel berikut. Detail Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022 dalam *Lampiran 1*.

Tabel 8
Aktivitas Utama Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Aktivitas Utama	
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi - Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas - Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan Pemeriksaan
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Evaluasi kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui Aplikasi SMP dan SIPTL serta kegiatan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut "Three Partied".
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Melaksanakan pemeriksaan Tematik Nasional
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan pemangku kepentingan
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi benturan kepentingan pemeriksa dengan entitas dalam penugasan pemeriksaan. Melaksanakan pengarahan dan internalisasi Nilai Dasar. Melaksanakan survei tingkat pemahaman atas nilai-nilai dasar BPK.
	8	Hasil Evaluasi AKIP	Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja per triwulan.
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Pimpinan mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi kepada seluruh pegawai meliputi aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal e-Audit, SiPTL, SIKAD, dan penggunaan <i>Big Data Analytics</i> serta Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Melaksanakan Aktivitas Manajemen Pengetahuan dan Implementasi <i>Best Practice</i> dan/atau Replikasi <i>Best Practice</i> .
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Melakukan perbaikan komunikasi dalam rangka efektivitas dan peningkatan kualitas hubungan, kerjasama dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Mengajukan usulan diklat dan melakukan monitoring pegawai yang mengikuti diklat.
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	Melaksanakan Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama (Itama) atas Implementasi SAKIP Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai sebesar 88,65 dengan predikat A (Memuaskan). Perolehan nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang mendapatkan nilai sebesar 87,87 dengan predikat A (Memuaskan). BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi Itama terhadap hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 dengan meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja yang lebih baik.

Hasil evaluasi Itama atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 untuk masing-masing komponen penilaian sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 9
Hasil Evaluasi Itama atas Implementasi SAKIP Tahun 2021

No	Hasil Evaluasi PerKomponen/Sub Komponen	Bobot	Capaian Organisasi	
A	Perencanaan Kinerja	30.00	30.00	100%
	I. Perencanaan Strategis <ol style="list-style-type: none"> 1. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Renstra serta telah dipublikasikan pada situs web Perwakilan. 2. Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil. 3. Program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra yang telah selaras, relevan, dan cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. 4. Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah selaras dengan dokumen Renstra AKN V. 5. Sasaran yang dimuat dalam Renstra telah dipetakan/diidentifikasi pada setiap kegiatan dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 6. Renstra telah direviu secara berkala diantaranya adalah penyesuaian target setiap tahunnya pada PK. 			
	II. Perencanaan Kinerja Tahunan <ol style="list-style-type: none"> 1. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan berupa PK. 2. Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. 3. PK telah mencantumkan anggaran sebesar Rp35.098.987.000,00, yang dirinci untuk setiap sasaran dan telah selaras dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 			

	<p>4. RA telah mencantumkan kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.</p> <p>5. PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai dengan tingkat Eselon III dan IV.</p>			
B	Pengukuran Kinerja	25.00	23.75	95%
	<p>1. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah memiliki IK dan Indikator Rincian Output (IRO) sebagai ukuran kinerja secara formal serta telah dipublikasikan pada website perwakilan.</p> <p>2. Pengukuran kinerja sampai dengan level Eselon II telah dilakukan secara berkala dengan suatu mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan aplikasi PRISMA.</p> <p>3. Hasil pengukuran capaian kinerja telah digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p> <p>4. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring pencapaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, dan individu masih dilakukan secara tahunan.</p>			
C	Pelaporan Kinerja	15.00	7.52	50.13%
	<p>1. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun LAKIN dan telah dipublikasikan pada website perwakilan.</p> <p>2. LAKIN telah menyajikan seluruh pencapaian kinerja dan informasi kinerja yang diperjanjikan dalam PK.</p> <p>3. LAKIN telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output. Sasaran Kegiatan ini merupakan dukungan pencapaian Sasaran Program Eselon I yang berorientasi outcome.</p> <p>4. LAKIN telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja mengenai faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya target kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan/mempertahankan capaian kerjanya.</p> <p>5. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah;</p> <p>a. LAKIN BPK Perwakilan Provinsi DK! Jakarta disampaikan kepada Direktorat PSMK melewati batas waktu yang ditetapkan.</p> <p>b. LAKIN telah menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target tahun berjalan dan antara realisasi dan capaian tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya, namun belum menyajikan perbandingan antara realisasi tahun pelaporan dengan target tahun periode akhir Renstra/target lima tahun.</p>			

	<p>c. LAKIN telah menyajikan informasi keuangan, khususnya anggaran yang telah dikaitkan dengan sasaran namun penyajian realisasi anggaran tidak dikaitkan dengan pencapaian setiap sasaran atau kinerja tertentu.</p> <p>d. LAKIN telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, namun penjelasan mengenai efisiensi hanya sebatas pada efisiensi penggunaan sumber daya sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan keuangan, dan belum dikuantifikasikan.</p>			
D	Evaluasi Internal	10.00	10.00	100%
	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja, evaluasi program/kegiatan, dan evaluasi atas pelaksanaan RA.</p> <p>2. Dokumentasi proses dan hasil evaluasi berupa kesimpulan atas keberhasilan/kegagalan kegiatan dan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan serta langkah nyata yang dilakukan atas rekomendasi yang diberikan telah dituangkan dalam bentuk notulensi hasil rapat pembahasan, dan penyajian dalam LAKIN secara berkala.</p>			
E	Capaian Kinerja	20.00	17.38	86.90%
	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai untuk kinerja sasaran yang bersifat output sebesar 17,38 dari bobot sebesar 20,00 atau 86,90%.</p> <p>2. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian sasaran/kinerja yang dilaporkan sebagai berikut.</p> <p>a. Terdapat tiga target tahun berjalan yang tidak tercapai yaitu IK 1, IK 7, dan IK 12.</p> <p>b. Terdapat enam capaian kinerja tahun berjalan yang lebih rendah atau sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu IK 2, IK 5, IK 6, IK 7, IK 9, dan IK 13.</p>			

Terhadap hasil evaluasi tersebut, Itama merekomendasikan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapaian kinerja Eselon III, IV dan individu secara berkala.
2. Meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) dengan:
 - a. Menyampaikan LAKIN kepada Direktorat PSMK tepat waktu.
 - b. Meningkatkan kualitas informasi pembandingan antara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra sesuai Lampiran II.3 Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017.

- c. Menyajikan informasi keuangan baik anggaran maupun realisasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran atau kinerja tertentu.
 - d. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja.
3. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.
 4. Mendokumentasikan proses tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi periode sebelumnya sehingga menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah adanya tindak lanjut serta menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada Itama.

Atas rekomendasi Itama tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan melakukan upaya sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapaian kinerja Eselon III, IV dan individu secara berkala;
2. Meningkatkan kualitas penyajian informasi perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra dalam LAKIN;
3. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai;
4. Mendokumentasikan proses tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi Itama.

B. Capaian Kinerja

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

1. Secara aktif melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan, termasuk melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal.
2. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi secara *Three Partied* dengan pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).
3. Melaksanakan pengarahannya dan upaya internalisasi Nilai Dasar BPK.
4. Melakukan monitoring potensi benturan kepentingan Pemeriksa dengan entitas dalam penugasan pemeriksaan.
5. Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah sebagai bahan masukan IHPS BPK.
6. Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan.
7. Meningkatkan pemanfaatan layanan Teknologi Informasi melalui pemanfaatan layanan teknologi informasi aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SiAP, dan SiPTL.
8. Melaksanakan Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang mencakup Usulan *Best Practice* dan penerapannya, dan pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan berupa *Peer Assist, Coaching, Mentoring* dan Pendidikan dan Pelatihan.

Pada Tahun 2022, skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebesar 99.14 Skor tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan skor capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 100,05, namun skor Tahun 2022 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan skor capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 95.43.

Skor capaian kinerja periode tahun 2020 s.d. 2022 menunjukkan tren sebagaimana dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 5 Skor Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Dari gambar grafik skor capaian kinerja Tahun 2020-2022 tersebut, apabila dibandingkan dengan skor capaian kinerja Tahun 2021, skor capaian kinerja Tahun 2022 mengalami penurunan. Namun skor capaian kinerja Tahun 2022 tetap mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020.

Skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diukur berdasarkan pencapaian atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10
Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp33.154.591.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83.33%	83.33
- Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp7.542.345.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100.00%	100.00
- Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp25.612.246.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85.70%	105.00

4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100.95%	100.95
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100.00
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101.27%	101.27
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4.70)	94.00
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	A (88.65)	100.74
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	85.12%	87.75
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100.00%	100.00
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3.79)	99.74
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	99.38%	99.38
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90.39%	102.71

Realisasi indikator kinerja utama pada Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja yang **belum mencapai target** yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
 - b. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
 - c. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - d. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
 - e. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
2. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja yang **mencapai target** sesuai target yang ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
 - b. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
 - c. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan
 - d. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
3. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja yang **melebihi target** yang ditetapkan, yaitu;
 - a. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 - b. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 - c. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
 - d. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan realisasi pada Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp33.154.591.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83.33%	90,00%	75%
- Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp7.542.345.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100.00%	100%	100%
- Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp25.612.246.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85.70%	79,65%	76.21%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100.95%	100,61%	100.44%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00%	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101.27%	100,35%	102%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4.70)	4,41	4.44
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	A (88.65)	87,87	86.64
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	85.12%	98,90%	98,90%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100.00%	100,00%	25%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3.79)	3,98	3.79
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	99.38%	99,38%	96.79%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90.39%	89,91%	91.27%

Selanjutnya, perbandingan realisasi pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama pada Tahun 2022 dengan target kinerja lima tahun (Tahun 2024) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahun Kinerja					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	83.33%	83.33%
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	85.70%	114.26%
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100.95%	100.95%
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	101.27%	101.27%
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,70)	94.00%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (88,65)	98.44%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	85.12%	85.12%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,79)	99.73%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	99.38%	99.38%
13.	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87.5%	88%	88.5%	89.7%	90.39%	100.76%

Penjelasan atas capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Perbandingan pencapaian dan target IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020-2024

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	75%	90%	83.33%		
Capaian	75	90	83.33		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	75%	90%	83.33%		

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 83.33% dari target sebesar 100%.

Selain belum memenuhi target, realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 90%. Penurunan realisasi ini terlihat pada penurunan hasil evaluasi Direktorat EPP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Capaian IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 diukur berdasarkan hasil pemenuhan QA dan QC, Hasil Evaluasi EPP dan Hasil Reviu Itama, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Hasil Pemenuhan QA dan QC atas 11 (sebelas) LHP sebesar 100%;
- b. Hasil Evaluasi EPP dengan nilai sebesar 66,7%, yang terdiri dari:
 - 1) Tingkat Konsistensi atas LHP dengan nilai sebesar 66.67%; dan
 - 2) Tingkat Akurasi atas LHP dengan nilai sebesar 66.67%.
- c. Hasil Reviu Itama dengan nilai sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2021, hasil QA dan QC atas LHP mempunyai nilai yang sama yaitu sebesar 100%.

Hasil evaluasi Direktorat EPP Tahun 2021 adalah sebesar 80%, yang terdiri atas Tingkat Konsistensi LHP sebesar 50% dan Tingkat Akurasi LHP sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, hasil evaluasi Direktorat EPP adalah sebesar 66,67% yang terdiri dari Tingkat Konsistensi LHP sebesar 66.67% dan Tingkat Akurasi LHP sebesar 66.67%. Tingkat Akurasi LHP Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai Tingkat Akurasi LHP Tahun 2021 sebesar 100%.

Ketidaktercapaian target 100% pada Tahun 2022 dikarenakan adanya penurunan hasil evaluasi EPP atas LHP, terutama pada Tingkat Akurasi atas LHP.

Untuk mendukung ketercapaian target kinerja pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan tetap meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, memastikan tingkat keakuratan dan konsistensi penyajian pada LHP.

Dalam rangka mempertahankan dan mencapai target atas IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan).

Aplikasi SiAP digunakan pemeriksa untuk mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses reuiu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan telah mencapai 83.33% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan upaya efisiensi melalui pemanfaatan aplikasi SiAP, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan diukur dari hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP dengan Harapan Penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Perbandingan pencapaian dan target IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020-2024

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100	100	100		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat EPP atas 10 (sepuluh) Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, keseluruhannya memiliki Simpulan yang sesuai dengan harapan penugasan, sehingga realisasi pencapaian indikator ini adalah sesuai target yaitu sebesar 100%.

Dalam rangka mencapai target pencapaian IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, upaya yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan kualitas Program Pemeriksaan (P2) agar dapat dilaksanakan secara optimal dalam kegiatan Pemeriksaan, sehingga mutu pemeriksaan dan harapan penugasan dapat selalu tercapai.

Untuk mendukung tetap tercapainya target kinerja tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan tetap meningkatkan kualitas LHP dan Program Pemeriksaan (P2) dengan berpedoman pada standar pemeriksaan.

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan telah mencapai 100% dari target Tahun 2024. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp6.386.762.396,00 dari anggaran sebesar Rp6.478.416.000,00.

Dengan menerapkan upaya tersebut, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Perbandingan pencapaian target Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020-2024

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	76.21%	79.65%	85.70%		
Capaian	101.61	105	105		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	101.61%	106.2%	114.26%		

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 85.70% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75%.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 9.094 rekomendasi ditambah dengan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 284 rekomendasi dibandingkan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada entitas selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 10.943 rekomendasi.

Capaian atas IKU ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan komitmen BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk aktif dalam melakukan pemantauan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah dengan melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi secara *Three Partied* yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Entitas, dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, dilakukan upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yaitu pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Berikut Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 s.d. 2022.



Gambar 5 Grafik Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 telah mencapai 114.26% dari target Tahun 2024. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp175.420.000,00 dari anggaran sebesar Rp175.591.000,00.

Dengan menerapkan upaya efisiensi melalui Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi secara *Three Partied* dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi SPM dan SiPTL, diharapkan target IKU ini akan dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Perwakilan terkait pemeriksaan tematik. Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/mandatory, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan.

Tema pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan pimpinan BPK, dengan memperhatikan isu strategis yang sedang berkembang dan menjadi permasalahan utama. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan dan terlibat dalam 3 (tiga) pemeriksaan tematik nasional yaitu:

- a. Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektivitas Sistem Pencegahan Korupsi Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. Semester I TA 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. (Tematik PN7 PP3 KP3);
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. (Tematik PN5); dan
- c. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran (TA) 2022 s.d. Oktober pada RSUD Cengkareng dan RSUD Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta. (Tematik PN7 PP4 KP2).

Perbandingan pencapaian target Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
Tahun 2020-2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100.44%	100.61%	100.95%		
Capaian	100.44	100.61	100.95		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100.44%	100.61%	100.95%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional telah mencapai 100% dari target Tahun 2024. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp724.968.900,00 dari anggaran sebesar Rp725.063.000,00.

Dengan komitmen dan upaya untuk pemenuhan pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Institusi Penegak Hukum. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Perbandingan pencapaian target Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020-2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100.00	100.00	100.00		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan telah mencapai 100% dari target Tahun 2024. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp33.019.006.585,00 dari anggaran sebesar Rp33.154.591.000,00.

Dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan responsif terhadap kebutuhan maupun permintaan pemeriksaan, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemeriksaan Tematik Lokal berdasarkan isu-isu strategis pada Provinsi DKI Jakarta. Isu strategis Provinsi DKI Jakarta dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

Perbandingan pencapaian target Tingkat Pemenuhan Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
Tahun 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	102%	100.35%	101.27%		
Capaian	102	100.35	101.27		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	102%	100.35%	101.27%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 adalah sebesar 101.27% dari target sebesar 100%.

Pemeriksaan Tematik Lokal yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah “Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya (Kinerja LFAR)”. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Terinci.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan komunikasi proaktif dengan Pimpinan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menampung masukan atas isu strategis dan isu lokal untuk dilakukan pemeriksaan tematik lokal.

Dengan adanya pemeriksaan tematik lokal, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan yang lebih tepat sasaran, dan berdampak pada masyarakat (*foresight*). Selain itu, hasil pemeriksaan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan mendukung pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Lokal telah mencapai 101.27% dari target Tahun 2024. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp318.369.743,00 dari anggaran sebesar Rp318.407.000,00.

Dengan melakukan upaya komunikasi proaktif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan responsif terhadap isu lokal dan kebutuhan pemeriksaan, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini merupakan Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Perbandingan pencapaian target Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 19 Perkembangan Capaian IKU
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020-2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,44	4,41	4,70		
Capaian	88.8	88.2	94		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	88.8%	88.2%	94%		

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 adalah sebesar **4,70 (Sangat Memuaskan)** dari target sebesar **5.00 (Sangat Memuaskan)**.

Pengukuran capaian ini dilakukan melalui Survei Pengukuran Indikator. Pada tahun 2021, capaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK adalah sebesar **4,41** kategori **Sangat Memuaskan**. Pada tahun 2020, capaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK adalah sebesar **4,44** kategori **Sangat Memuaskan**. Dengan demikian maka apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020, terdapat peningkatan capaian atas Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada Tahun 2022.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melakukan upaya peningkatan implementasi nilai dasar BPK, diantaranya sebagai berikut.

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan telah mendapatkan Penghargaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 20 Desember 2021;

- b. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Pengarahan Kepala Perwakilan terkait penerapan Nilai Dasar BPK dan internalisasi Nilai Dasar BPK pada saat *Entry Meeting* dan pada saat sebelum dilaksanakan pemeriksaan;
- d. Pemberian teladan oleh para Pimpinan (baik Pimpinan sebagai *Role Model* maupun sebagai Agen Perubahan) menjadi motivasi bagi pegawai untuk menerapkannya secara berkelanjutan;
- e. Sosialisasi Anti Gratifikasi melalui *Standing Banner*; dan kegiatan lain yang mendukung implementasi dan internalisasi Nilai Dasar BPK.

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK telah mencapai 94% dari target Tahun 2024. Realisasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp240.411.960,00 dari Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan dengan anggaran sebesar Rp242.243.000,00.

Dengan menerapkan upaya perbaikan peningkatan implementasi dan internalisasi nilai-nilai dasar BPK tersebut, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Surat Keputusan Menpan Nomor KEP/135/M.PAN/09/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun dan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Pengukuran nilai capaian indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama (Itama).

Perbandingan pencapaian target Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 20 Perkembangan Capaian IKU
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024

IKU 8 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
Realisasi	A (86.64)	A (87.87)	A (88.65)		
Capaian	100.74	101	100.74		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	96.21%	97.09%	98.45%		

Realisasi IKU Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 adalah sebesar **88.65 (A) Memuaskan** dari target sebesar **88 (A) Memuaskan**.

Apabila dibandingkan dengan realisasi IKU Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai sebesar **86.64 (A) Memuaskan** dari target sebesar **86.00 (A) Memuaskan**. Sedangkan pada tahun 2021, realisasi IKU Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar **87.87 (A) Memuaskan** dari target sebesar **87 (A) Memuaskan**.

Dengan demikian maka nilai realisasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi Itama terhadap hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 dengan meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja dalam LAKIN yang lebih baik.

Meskipun terdapat peningkatan realisasi IKU Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Itama dalam Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Realisasi IKU Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja telah mencapai 98.45% dari target Tahun 2024. Dengan terus dilakukan upaya perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Itama atas Implementasi SAKIP, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan Teknologi dan Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BPK.

Perbandingan pencapaian target IKU Tingkat Pemanfaatan TI pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 21 Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020-2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	98.90%	98.90%	85.12%		
Capaian	104.11	103.02	87.75		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	98.90%	98.90%	85.12%		

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan TI Tahun 2022 adalah sebesar 85.12% dari target sebesar 97%. Dari realisasi dan capaian IKU Tingkat Pemanfaatan TI Tahun 2022 tersebut, terlihat adanya penurunan dibandingkan dengan realisasi dan capaian IKU pada Tahun 2021 sebesar 98.90%.

Penurunan nilai capaian IKU Tingkat Pemanfaatan TI Tahun 2022 dikarenakan terdapat perbedaan kriteria penilaian realisasi dan capaian IKU Tingkat Pemanfaatan TI.

Pada tahun 2020 dan 2021, pengukuran penilaian realisasi dan pencapaian kinerja IKU Tingkat Pemanfaatan TI adalah dengan dilakukannya *log* akses pada aplikasi layanan dasar, aplikasi umum, aplikasi pemeriksaan dan aplikasi manajemen pengetahuan. Pengukuran nilai capaian tingkat pemanfaatan TI ini dilakukan berdasarkan Laporan Monitoring Biro Teknologi dan Informasi atas Pemantauan Layanan TI.

Pada Tahun 2022, terdapat perubahan pengukuran penilaian realisasi dan pencapaian kinerja pada IKU Tingkat Pemanfaatan TI sebagai berikut.

- a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.

- b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.
- c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.
- d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reuiu, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.
- e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Selain perbedaan pengukuran penilaian capaian IKU Pemanfaatan TI pada Tahun 2022, faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi dan capaian IKU tersebut adalah adanya penugasan kepada beberapa Pegawai sebagai pelaksana administrasi Pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing Pemeriksa.

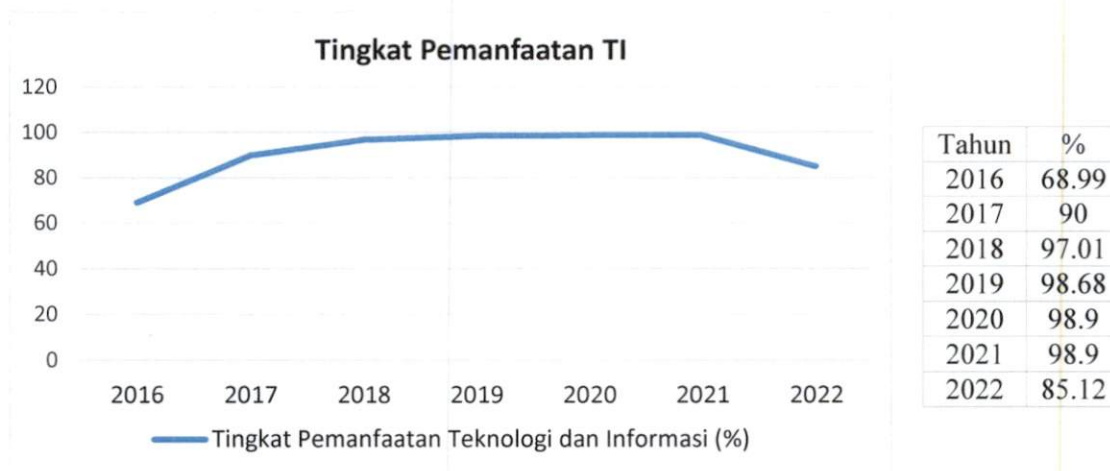
Tingkat pemanfaatan layanan dalam setiap aplikasi pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM adalah sebesar 99.01%.
- b. Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi JASMIN adalah sebesar 86.38%.
- c. Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SMP adalah sebesar 63.64%.
- d. Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SiAP adalah sebesar 74.58%.
- e. Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SiPTL adalah sebesar 98.85%.

Dalam rangka meningkatkan realisasi dan capaian IKU Pemanfaatan TI, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus mensosialisasikan pemanfaatan Teknologi dan Informasi melalui optimalisasi pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SiAP, SiPTL sesuai dengan tugas dan peran masing-masing Pegawai.

Dengan pemanfaatan Layanan Aplikasi oleh seluruh Pegawai, diharapkan akan tercipta budaya pemanfaatan teknologi dan informasi yang merata pada seluruh Pegawai BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Berikut grafik Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2016 s.d. 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 6 Grafik Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi telah mencapai 85.12% dari target Tahun 2024. Dengan upaya penerapan budaya pemanfaatan teknologi informasi yang merata pada seluruh Pegawai, diharapkan meskipun terdapat perubahan pengukuran penilaian realisasi dan capaian di masa mendatang, target IKU Tingkat Pemanfaatan TI akan dapat dicapai dan ditingkatkan pada tahun 2024.

10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini bertujuan untuk memastikan satker mengelola pengetahuan pegawai sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan pengetahuan antar pegawai. IKU ini juga dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management*. Pengukuran indikator ini dilakukan atas tingkat penyusunan *Best Practice*, Tingkat Penerapan *Best Practice* dan Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Perbandingan pencapaian target IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 22 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020-2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	25%	100%	100%		
Capaian	25	100	100		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	25%	100%	100%		

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada tahun 2022 tersebut tetap sama dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 100%. Dengan telah dibentuknya Tim Manajemen Pengetahuan setiap tahun dan diterapkannya Manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, diharapkan capaian IKU ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Pencapaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan tahun 2022 didukung oleh aktivitas manajemen pengetahuan dan penerapan *best practice* pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, yang diawali sejak tahun 2019 sampai dengan 2022, sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*).

Best practice yang sudah dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang:

- 1) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai *Best Practice* "Kantor Peduli Lingkungan (*Eco Office*) dan direplikasi oleh satker lain pada tahun 2020. *Eco Office* ini merupakan bagian dari Budaya Kerja "*Smart and Green*" yang diterapkan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menciptakan dan mengembangkan aplikasi *web basis* bernama SIUTI (Sistem Informasi Umum dan TI). SIUTI ini merupakan Digitalisasi Layanan Umum dan TI, yang terdiri dari Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas, Peminjaman Ruang dan Peminjaman Sarana dan Prasarana TI. Usulan *Best Practice* SIUTI telah mendapatkan persetujuan untuk diterapkan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

b. Melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah mereplikasi *Best Practice* "Model Pengelolaan Pusat Informasi dan Komunikasi Berbasis Internal *File Sharing* sebagai Bentuk Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat" sebagai upaya dalam capaian kinerja sub Indikator Kinerja Tingkat Penerapan *Best Practice*.

c. Melakukan aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Manajemen Pengetahuan telah berupaya untuk mengelola berbagai pengetahuan yang diperlukan oleh organisasi dan mengembangkannya sebagai aset intelektual organisasi yang terstruktur dan sistematis.

Pada tahun 2022, Tim Manajemen Pengetahuan mengidentifikasi adanya empat aktivitas manajemen pengetahuan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- 1) Bantuan Rekan Sejawat (*Peer Assist*);
- 2) *Coaching*;
- 3) *Mentoring*, dan
- 4) Pendidikan dan Pelatihan.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan Manajemen Pengetahuan dengan meningkatkan pengelolaan *Best Practice* dan replikasi *Best Practice* serta menerapkannya secara menyeluruh. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga akan terus meningkatkan aktivitas manajemen pengetahuan.

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan telah mencapai 100% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan upaya tersebut, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. IKU ini juga bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan melalui pelaksanaan survei oleh pihak eksternal.

Perbandingan pencapaian target IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 23 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020-2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,79	3,98	3,79		
Capaian	99.74	104.74	99.74		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	99.74%	104.74%	99.74%		

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 adalah sebesar **3,79 (Memuaskan)** dari target sebesar **3,8 (Memuaskan)**.

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 adalah sebesar **3,79**, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar **3,80**. Pada tahun 2021, capaian indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar **3,98 (Memuaskan)** dan melebihi target yang ditetapkan sebesar **3,80 (Memuaskan)**. Realisasi IKU pada tahun 2022 sebesar **3,79 (Memuaskan)** menunjukkan adanya penurunan dibandingkan realisasi tahun 2021.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi telah mencapai 99.74% dari target Tahun 2024. Dengan melakukan upaya peningkatan efektivitas dan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan tersebut, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan/diklat berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pegawai penunjang dan pendukung (non-pemeriksaan).

Pengukuran capaian indikator ini dengan perbandingan jumlah pegawai yang memenuhi jam diklat dengan jumlah seluruh pegawai.

Perbandingan pencapaian target IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel berikut.

Tabel 24 Perkembangan Capaian IKU
Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020-2024

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	96.79%	99.38%	99.38%		
Capaian	96.79	99.38	99.38		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	96.79%	99.38%	99,38%		

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 99,38% dari target sebesar 100%.

Berdasarkan pengukuran, realisasi capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021 sebesar 99,38% dan lebih tinggi dibandingkan realisasi capaian tahun 2020 sebesar 96,79%. Pada tahun 2022, jumlah pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi jam diklat adalah sebanyak 159 orang dari jumlah total pegawai sebanyak 160 orang.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan monitoring pemenuhan jam diklat dan peningkatan pemenuhan jam diklat melalui kerjasama penyelenggaraan diklat dengan Badan Diklat.

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi telah mencapai 99,38% dari target Tahun 2024. Dengan melakukan upaya monitoring pemenuhan jam diklat, dan melalui kerjasama penyelenggaraan diklat dengan Badan Diklat, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

13. Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- a. Penyerapan anggaran;
- b. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- c. Pencapaian keluaran;
- d. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran penilaian capaian indikator ini berdasarkan data rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran perwakilan yang dilakukan penilaiannya oleh Biro Keuangan. Penilaian dilakukan baik atas Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Tabel berikut adalah nilai EKA, EPA dan Kinerja Anggaran hasil penilaian Biro Keuangan tahun 2022.

Tabel 25
Hasil Penilaian Biro Keuangan atas EKA, EPA, Kinerja Anggaran Tahun 2022

Triwulan	Hasil Penilaian (%)		
	EKA	EPA	Kinerja Anggaran
Triwulan I	78.87	59.28	71.03
Triwulan II	64.10	95.74	76.76
Triwulan III	81.56	97.02	87.74
Triwulan IV	85.81	97.25	90.38

Perbandingan pencapaian target IKU Tingkat Kinerja Anggaran pada tahun 2020 s.d. 2024 dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 26 Perkembangan Capaian IKU
Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020-2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	88.5%	89.7%
Realisasi	91,27%	89,91%	90.39%		
Capaian	104.91	102.75	102.72		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024	101.75%	100.23%	100.76%		

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 90.39% dari target sebesar 88%. Realisasi Tahun 2022 ini lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 89,91%.

Capaian tersebut merupakan dampak dari upaya perbaikan kinerja anggaran yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja;
2. Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya;
3. Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dan
4. Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.

Selain itu, kualitas pencapaian kinerja anggaran juga dipengaruhi tingkat efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi anggaran per keluaran dan realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran dan target volume keluaran. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan terus berusaha memperbaiki kinerja anggaran dengan melakukan pengelolaan anggaran yang baik dan terencana serta memperhatikan efisiensi anggaran.

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran telah mencapai 100.76% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan upaya perbaikan kinerja anggaran dan tingkat efisiensi, diharapkan target IKU ini akan dapat dicapai dan dipertahankan pada tahun 2024.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”, upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 27 Upaya Efisiensi per Indikator Kinerja Utama

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Upaya Efisiensi
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi yaitu pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) dalam tahapan pemeriksaan.
- Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Meningkatkan kualitas Program Pemeriksaan (P2) agar dapat dilaksanakan secara optimal dalam kegiatan Pemeriksaan, sehingga mutu pemeriksaan dan harapan penugasan dapat selalu tercapai.
- Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	a. Melaksanakan Pemantauan tindak lanjut secara <i>Three Partied</i> yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Entitas, dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dhi .aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Optimalisasi pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional dan pemanfaatan TI.
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Anggaran Pemeriksaan.
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Melakukan komunikasi proaktif dengan Pimpinan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menampung masukan atas isu strategis dan isu lokal untuk kemudian dilakukan pemeriksaan tematik lokal.

7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	<p>a. Pengarahan Kepala Perwakilan terkait penerapan Nilai Dasar BPK pada saat Entry Meeting dan pada saat sebelum dilaksanakan pemeriksaan.</p> <p>b. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.</p> <p>c. Survei Pengendalian Gratifikasi kepada Pemeriksa dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2021).</p> <p>d. Sosialisasi Anti Gratifikasi melalui <i>Standing Banner</i>.</p>
8	Hasil Evaluasi AKIP	<p>a. Peningkatan kualitas penyajian informasi dalam LAKIN sesuai pedoman yang berlaku.</p> <p>b. Menindaklanjuti rekomendasi Itama atas Implementasi SAKIP.</p>
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi oleh seluruh Pegawai.
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<p>a. Melakukan pengelolaan/replikasi <i>Best Practice</i> yang mempunyai daya guna dan dapat diimplementasikan.</p> <p>b. Tim Manajemen Pengetahuan mendorong dan melakukan monitoring aktivitas manajemen pengetahuan.</p> <p>c. Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat/Biro terkait dalam pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.</p>
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Kerjasama dengan Badan Diklat Pegawai BPK dan Biro terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan Aktivitas Manajemen Pengetahuan, termasuk diklat.

	13	Tingkat Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran antar unit kerja; b. Menyusun RPD secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kepastian pelaksanaan rencana kegiatannya; c. Meminta unit kerja untuk membuat rencana kegiatan dan anggarannya, sehingga dapat dipantau dan dievaluasi jika ada yang belum terlaksana; dan d. Melakukan revisi anggaran secara lebih cermat.
--	----	--------------------------	---

Selain upaya efisiensi dalam tabel tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga melakukan upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SiAP, SMP, SIPTL, Jasmin, Kelola Tugas dan aplikasi lain dalam pelaksanaan tugas.
2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan penghapusan atas BMN yang sudah tidak memberikan nilai manfaat dan membebani biaya pemeliharaan atas kendaraan dinas dan barang inventaris.
3. Pemanfaatan aplikasi *zoom meeting* dalam rangka efisiensi waktu dan biaya Rapat.
4. Efisiensi pengaturan penggunaan BMN berupa elevator.
5. Efisiensi penggunaan perjalanan dinas biasa.

D. Perubahan Budaya Kerja

Sejak Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai *Best Practice* “Kantor Peduli Lingkungan (*Eco Office*) dan direplikasi oleh satker lain pada tahun 2020. *Eco Office* ini merupakan bagian dari Budaya Kerja “*Smart and Green*” yang diterapkan di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. “*Smart and Green*” merupakan budaya kerja yang bersifat dinamis, kreatif, dan berintegritas dimana selalu mengedepankan teknologi dan efisiensi dalam bekerja dengan menciptakan kondisi kerja yang nyaman untuk meningkatkan produktivitas.

Pencapaian Budaya Kerja “*Smart and Green*” diantaranya adalah *Eco Office*, E-KKP (Satu Data), dan *E-Storage*.



Gambar 8 Pola Pikir dan Budaya Kerja “Smart and Green”

Budaya Kerja “Smart and Green” telah mengantarkan Penghargaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 20 Desember 2021.

Dalam rangka meningkatkan semangat budaya kerja yang lebih baik, pada Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengusung Budaya Kerja “CHAKEP” yang terdiri dari unsur *Competent, Honesty, Adaptive, Knowledge, Energetic* dan *Professional*.

E. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp33.154.591.000,00, yang terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sebesar Rp7.542.345.000,00,- dan anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebesar Rp25.612.246.000,00.

Dari alokasi anggaran tersebut, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mampu merealisasikannya sebesar Rp33.019.006.585,00 atau 99,59% dari anggaran. Pagu dan realisasi anggaran RKP dan RKSP TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28 Pagu dan Realisasi Anggaran RKP TA 2022

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
1	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	6.478.416.000	11 LHP	6.386.762.396	98,59
2	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	18.223.000	10 LHP	18.222.500	100,00
3	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.200.000	1 Laporan	900.000	75,00

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
4	Sumbangan IHPS Perwakilan	7.829.000	2 Laporan	7.828.997	100,00
5	Laporan Profil Entitas Perwakilan	16.010.000	1 Laporan	16.008.420	99,99
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	175.591.000	2 Laporan	175.420.000	99,90
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	90.086.000	2 Laporan	83.546.000	92,74
8	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	754.990.000	6 LHP	749.972.664	99,34
JUMLAH		7.542.345.000		7.438.660.977	98,63

Tabel 29 Pagu dan Realisasi Anggaran RKSP TA 2022

No	Keluaran	Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Perkantoran	23.141.422.000	1 Layanan	23.119.494.677	99,91
2	Layanan Sarana Internal	405.500.000	17 Unit	405.091.840	99,90
3	Layanan Prasarana Internal	410.000.000	3 Unit	403.723.761	98,47
4.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	128.200.000	14 Unit	128.198.360	100,00
5	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	242.243.000	12 Laporan	240.411.960	99,24
6	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.284.881.000	20 Laporan	1.283.425.010	99,89
JUMLAH		25.612.246.000		25.580.345.608	99,88

Dukungan Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja disusun atas satu Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” yang terbagi dalam dua strategi yaitu Strategi 1 “Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas” dan Strategi 2 “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan” dimana kedua strategi ini tidak dibagi per tiap jenis IKU, sehingga dukungan anggaran dapat dilihat jika menjabarkan indikator kinerja keluaran dalam tabel berikut.

Tabel 30
Indikator Kinerja Keluaran beserta Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	6.478.416.000	6.386.762.396	98,59
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	18.223.000	18.222.500	100,00
		Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	1.200.000	900.000	75,00
		Sumbangan Perwakilan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	7.829.000	7.828.997	100,00
		Laporan Profil Entitas Perwakilan	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	16.010.000	16.008.420	99,99
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	175.591.000	175.420.000	99,90
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	90.086.000	83.546.000	92,74
		LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	754.990.000	749.972.664	99,34
Total Strategi Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas				7.542.345.000	7.438.660.977	98,63
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	23.141.422.000	23.119.494.677	99,91

Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis	Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran	Realisasi	%
	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	128.200.000	128.198.360	100,00
	Layanan Sarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Jumlah Pengadi Peralatan Fasilitas Perkantoran	405.500.000	405.091.840	99,90
	Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	410.000.000	403.723.761	98,47
	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	242.243.000	240.411.960	99,24
	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	1.284.881.000	1.283.425.010	99,89
Total Strategi Meningkatkan Layanan Pemeriksaan			25.612.246.000	25.580.345.608	99,88
Total Sasaran Kegiatan/Sasaran Strategis			33.154.591.000	33.019.006.585	99,59

F. Inovasi

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta masih melanjutkan inovasi yang telah dikembangkan dari tahun 2019 dan 2021 serta masih diimplementasikan pada tahun 2022 sebagai berikut.

- Digitalisasi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam Aplikasi E-KKP (SATU DATA);
- E-storage* mewujudkan penyimpanan dan sharing data dalam Satu Portal;
- SIUTI (Sistem Informasi Umum dan TI) merupakan Digitalisasi Layanan Umum dan TI (*web basis*), yang terdiri dari Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas, Peminjaman Ruangan dan Peminjaman Sarana dan Prasarana TI;
- BPK *Link* sebagai bentuk komunikasi proaktif dengan para *stakeholder* untuk menampung isu lokal sebagai bahan atau tema pemeriksaan.

G. Penghargaan

Berikut adalah penghargaan yang diperoleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2020 s.d. 2022.

- Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta VII dengan IKPA Terbaik Ketiga Tahun 2020 (Kategori anggaran s.d. 50 Milyar);
- Bangunan Ramah Pesepeda Tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Pembangunan Zona Integritas “Wilayah Bebas Korupsi” Tahun 2021;

4. Satuan Kerja Mitra KPPN Jakarta VII dengan IKPA Terbaik Ketiga Periode Semester I 2022 (Kategori anggaran s.d. 50 Milyar);
5. Penyusun Tulisan Hukum Terbaik Kedua Tahun 2020;
6. Penyusun Tulisan Hukum Terbaik Kedua Tahun 2021;
7. Zona Hijau UJDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 s.d. 2021.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, nilai dasar dan sasaran strategis BPK RI. Pencapaian skor kinerja tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan skor kinerja tahun 2021, yaitu dari 100.05 menjadi 99.14.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

1. Pencapaian IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada Tahun 2022 sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu mencapai target sebesar 100%.
2. Pencapaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian Tahun 2021 yaitu sebesar 85.70% yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 75%.
3. Pencapaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian Tahun 2021 yaitu sebesar 100.95% dari target yang ditetapkan.
4. Pencapaian IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu mencapai target sebesar 100%.
5. Pencapaian IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian Tahun 2021 yaitu sebesar 101.27% yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%.
6. Pencapaian IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian Tahun 2021 yaitu A (88.65) yang melebihi target yang ditetapkan yaitu A (88).
7. Pencapaian IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 sama dengan capaian Tahun 2021 yaitu mencapai target sebesar 100%.
8. Pencapaian IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian Tahun 2021 yaitu sebesar 90.39% yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 88%.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target sebagai berikut:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
3. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
4. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
5. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Atas indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan langkah-langkah perbaikan berupa:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi menjadi penyebab dan mengelola resiko kegagalan pencapaian target kinerja yang diharapkan;

2. Melakukan *cross review* atas penyusunan konsep LHP yang diterbitkan, terutama terkait konsistensi dan akurasi dalam penyajian LHP;
3. Mendorong Pegawai untuk terus meningkatkan Pemahaman terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional dan personalnya. Internalisasi visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang dapat menjaga kredibilitas di mata pemangku pemilik kepentingan;
4. Mengembangkan media yang dapat digunakan untuk menanamkan Nilai Dasar BPK yang sekaligus berfungsi menjalankan pengawasan atas indikasi pelanggaran atas Nilai Dasar BPK tersebut;
5. Menciptakan budaya pemanfaatan TI secara merata kepada seluruh Pegawai melalui pemanfaatan layanan aplikasi oleh setiap pegawai sesuai tugas dan peran masing-masing.
6. Melakukan monitoring pemenuhan jam diklat Pegawai dan melakukan kerjasama dengan Badan Diklat untuk penyelenggaraan diklat.
7. Melakukan upaya peningkatan efektivitas dan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Upaya perbaikan yang berkesinambungan perlu terus dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan peran BPK sebagai pendorong reformasi birokrasi yang menghasilkan tata kelola negara yang transparan, akuntabel dan berwibawa.

Sebagai perwujudan komitmen perbaikan yang berkelanjutan, Kepala Perwakilan secara periodik melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan kendala yang dihadapi. Dengan evaluasi tersebut diharapkan unit-unit kerja dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang efektif dalam penyelesaian kendala ketercapaian target kinerja.

Mengetahui
Kepala Perwakilan,



Ayub Amali
NIP 197204181994011001

Jakarta, 31 Januari 2022
Manajer IKU,



Herry Kurniawan
NIP 198011282008081001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Tahun : 2022

A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi pada pemeriksaan Semester I. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD Tahun 2021 atas 1 entitas. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Pemeriksaan Tematik Kinerja Nasional dan Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal, dan PDTT.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Pemeriksaan Tematik Kinerja Nasional dan Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal, dan PDDT.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester I Tahun 2022. • Evaluasi kesesuaian Simpulan dalam LHP LKPD dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2022. • Evaluasi kesesuaian Simpulan dalam LHP LKPD dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan. Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kesesuaian Simpulan dalam LHP Kinerja Tematik dan PDDT dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kesesuaian Simpulan dalam LHP Kinerja Tematik dan PDDT dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui Aplikasi SMP dan SIPTL.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL. Verifikasi dan Validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ke dalam statis Telah Selesai (TS). Melakukan Kegiatan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	40%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran pemeriksaan tematik nasional. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan tematik Nasional pada Triwulan III dan IV. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Tematik Nasional. <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan LHP Pemeriksaan Tematik Nasional.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Triwulan I-IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan Melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan pemangku kepentingan. Penyusunan LHP.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	4%	100%	Juli- September	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran pemeriksaan tematik lokal.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan III-IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal. Penyusunan LHP Tematik Lokal.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	5,00	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa dalam Pemeriksaan LKPD, Kinerja dan PDTT. Melaksanakan pengarahan dan internalisasi Nilai Dasar oleh Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai. Melaksanakan survei untuk mengukur tingkat pemahaman seluruh pegawai BPK DKI atas nilai-nilai dasar BPK.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	-	-	-	87,00	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022. Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Menindaklanjuti rekomendasi ITAMA atas reviu yang dilakukan di perwakilan. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi. Menindaklanjuti rekomendasi ITAMA

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>atas reviu yang dilakukan di perwakilan.</p> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku. • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi. • Menindaklanjuti rekomendasi ITAMA atas reviu yang dilakukan di perwakilan. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku. • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi. • Menindaklanjuti rekomendasi ITAMA atas reviu yang dilakukan di perwakilan. • Menyusun LAK Tahun 2022.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	<p>Triwulan I-IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai meliputi aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal e-Audit, SiPTL, SIKAD, dan penggunaan Big Data <i>Analytics</i> serta Aplikasi Manajemen Pengetahuan.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	25%	50%	100%	Desember	<p>Triwulan I-II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap Uji Coba (Piloting) <i>Best Practice</i> Tahun 2021.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penerapan Uji Coba (Piloting) <i>Best Practice</i> Tahun 2021. Melaksanakan aktivitas Manajemen Pengetahuan. <p>Triwulan III-IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan <i>Best Practice</i> Tahun 2021 berdasarkan Hasil Evaluasi. Implementasi <i>Best Practice</i> Tahun 2021. Melaksanakan aktivitas Manajemen Pengetahuan.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	3,80	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakilan. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kuesioner terkait efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Membagikan kuesioner kepada responden/pemangku kepentingan. <p>Triwulan III-IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisa dan evaluasi atas hasil survei terkait kualitas komunikasi kepada pemangku kepentingan. Melakukan perbaikan terkait efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	20%	40%	60%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usulan diklat untuk Pegawai sesuai ND Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan Diklat Kompetensi bagi Pegawai. • Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai. • Pelaksanaan diklat pemeriksaan LKPD. <p>Triwulan II-III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan usulan peserta diklat. • Mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan/Balai Diklat . • Monitoring Pencapaian Jam Diklat Pegawai. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan usulan peserta diklat. • Mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan/Balai Diklat. • Mengikuti Diklat bagi Pegawai Sekretariat Perwakilan. • Monitoring Pencapaian Jam Diklat Pegawai.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	23,88%	48,44%	73,60%	87%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA 2021 dan Kebijakan TA 2021. • Menyusun Dokumen Penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran. • Menyusun data capaian <i>Output</i>. • Menyusun dan melaksanakan Rencana Penarikan Dana (RPD) <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Revisi RPD. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja. Melaksanakan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Revisi RPD. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja. Melaksanakan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Revisi RPD. Menyusun Laporan Keuangan Perwakilan. Sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun untuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

B. Target Kinerja Keluaran

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas							
Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program Pemeriksaan LKPD TA 2021, Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal serta Pemeriksaan PDTT. Melaksanakan Pemeriksaan LKPD TA 2021. Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan LKPD TA 2021. Menyusun LHP Pemeriksaan LKPD TA 2021. Penyampaian LHP LKPD Tahun 2021. Triwulan III-IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta PDTT. Menyusun LHP Kinerja Tematik Nasional dan Tematik Lokal serta LHP PDTT. Penyampaian LHP Kinerja dan LHP PDTT.
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	0%	100%	100%	100%	April	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program Pemeriksaan. Melaksanakan pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik.
Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan LK TA 2022.

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Interim/Pendahuluan LK TA 2022.
Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti kerugian negara atau daerah	100%	0%	0%	100%	100%	Juni & Desember	<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program Pemantauan/ Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I. Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SIKAD. Menyusun dan Menyampaikan laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah. <p>Triwulan IV :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program Pemantauan/ Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II. Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SIKAD. Menyusun dan Menyampaikan laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah.
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	0%	0%	100%	100%	Juli & Desember	<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembahasan PTL Semester I. Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SiPTL. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembahasan PTL Semester I dan Semester berjalan. Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SiPTL.

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Pemantauan Tindak Lanjut.
Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	0%	0%	0%	100%	November	Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan untuk penyusunan Bahan Pendapat dan Pertimbangan. Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.
Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	0%	0%	70%	100%	Desember	Triwulan III - IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penginputan Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP.
Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	0%	0%	100%	100%	Juni & Desember	Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Profil Entitas. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka melakukan pemutakhiran penyusunan Profil Entitas. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pemutakhiran Profil Entitas. Menyusun Laporan Profil Entitas.
Layanan Manajemen Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Manajemen Pemeriksaan	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I : <ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana penyerapan anggaran/Rencana Penarikan Dana (RPD). Menyusun Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan. Triwulan II : <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Membuat anggaran yang diperlukan. revisi yang <p>Triwulan III :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan Membuat anggaran yang diperlukan. revisi yang <p>Triwulan IV :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan Membuat anggaran yang diperlukan. revisi yang
Sasaran	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan							
Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)	-	-	-	3,80	Desember	<p>Triwulan III :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kuesioner Kepuasan atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan; Membagikan kuesioner kepada responden dhi. seluruh pegawai atas penyelenggaraan layanan bidang hukum, kehumasan, tata usaha, SDM, keuangan, Umum dan TI; Melakukan analisis hasil survei. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi atas layanan Sekretariat Perwakilan berdasarkan hasil survei. Melakukan perbaikan Layanan Sekretariat Perwakilan berdasarkan analisis hasil survei.
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 unit kendaraan roda empat (mobil). 1 unit kendaraan	-	-	-	-	-	<p>Triwulan IV:</p> <p>Tahun 2022 Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan melakukakn pengadaan 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor.</p>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		n roda dua (sepeda Motor)						
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4 unit Scanner, 4 PC Unit, 6 unit Printer	-	-	-	-	Desember	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	6 unit Dispenser, 1 unit Camcorder dan 1 unit Sound Mixer	-				Desember	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengadaan Fasilitas Perkantoran
	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	-	-	-			-	Tahun 2022 Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan.
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	95%	15%	35%	60%	95%	Desember	Triwulan I s.d. IV : <ul style="list-style-type: none"> Menyusun daftar gaji dan tunjangan. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan.
	Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	20%	40%	60%	95%	Desember	Triwulan I s.d. IV : <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.